

352
RAH
P



LAPORAN HASIL PENELITIAN

**PENGARUH PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH
NO.7 TAHUN 1985 TERHADAP KETAATAN IZIN PEMILIK
USAHA PERTAMBANGAN PASIR DI KODIA SEMARANG**

(THE EFFORTS OF LAW ENFORCEMENT OF THE REGIONAL REGULATION
NUMBER 7, 1985 ON THE PERMIT OWNERSHIP LOYALTY OF THE OWNERS
OF SAND MINING OPERATIONS IN MUNICIPALITY OF SEMARANG)

OLEH :

NOOR RAHARDJO, SH



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
1996**

RINGKASAN

Supaya hukum, dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Tengah No. 7 Tahun 1985 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, khususnya penegakan hukum terhadap pasal 4 ayat (5), pasal 10 huruf (g) dan pasal 11 huruf (c) dapat berlaku di masyarakat dalam arti bahwa hukum tersebut ditaati oleh pemilik usaha pertambangan pasir, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Penegakan Hukum itu sendiri.

Penegakan Peraturan Daerah ini masih kecil pengaruhnya terhadap ketaatan para pemilik usaha pertambangan pasir (hanya sebagian yang taat), khususnya ketaatan mereka terhadap syarat-syarat yang tertuang dalam Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD). Ini berarti bahwa ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi ketaatan mereka.

Penelitian ini menekankan pada social legal research, suatu penelitian hukum yang bersifat empiris. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah para pemilik usaha pertambangan pasir di bawah 1 hektar di Kodya Semarang, yaitu di sungai Kedungsari, sungai Kaligarang, sungai Rowosari, sungai Pingkol dan sungai Kedungsari. Data yang diperoleh baik yang bersifat primer maupun sekunder dianalisa secara kualitatif dan atau kuantitatif dengan menggunakan tabel dan dan dengan perhitungan statistik.

Dari perhitungan statistik diperoleh bahwa penegakan hukum mempengaruhi ketaatan perizinan pemilik usaha pertambangan pasir dengan hubungan kurang bermakna.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karuniaNya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan laporan akhir penelitian dengan judul Pengaruh Penegakan Hukum Peraturan Daerah No. 7 Tahun 1985 terhadap Ketaatan Izin Pemilik Usaha Pertambangan pasir di Kodya Semarang.

Dengan telah selesainya laporan akhir penelitian ini, Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada :

- Rektor Universitas Diponegoro Semarang
- Ketua Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro
- Walikotaamadya KDH Tingkat II Semarang
- Tim Pertambangan Bahan Galian Golongan C Kodya Dati II Semarang
- Kepala Bagian Perekonomian Kodya Dati II Semarang
- Kepada Dinas Pekerjaan Umum Cabang Dinas Tuntang Hilir
- Para pemilik usaha pertambangan pasir sebagai responden

Peneliti menyadari bahwa penyusunan laporan akhir penelitian ini masih jauh dari sempurna, kekurangan yang terdapat di dalamnya tidak lain karena terbatasnya pengetahuan dan kemampuan peneliti. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan.

Semoga hasil laporan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum secara umum maupun Ilmu Hukum Administrasi Negara khususnya.

Semarang, 28 Pebruari 1996

~~Yda~~ Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|-----|
| RINGKASAN | 1 |
| KATA PENGANTAR | 11 |
| DAFTAR ISI | 111 |
| DAFTAR TABEL | v |
| | |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 4 |
| | |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA | 5 |
| A. Pengaturan Hukum Bahan Galian Go- longan C | 5 |
| B. Izin Pertambangan Daerah | 8 |
| C. Fungsi dan Bekerjanya Hukum | 12 |
| D. Penegakan Hukum | 15 |
| E. Ketaatan Masyarakat Pada Hukum ... | 22 |
| | |
| BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN | 26 |
| A. Tujuan Penelitian | 26 |
| B. Manfaat Penelitian | 26 |
| | |
| BAB IV. METODE PENELITIAN | 28 |
| A. Pendekatan Masalah | 28 |
| B. Variabel | 28 |
| C. Definisi Operasional | 28 |
| D. Teknik Pengambilan Sample | 30 |
| E. Sumber Data | 30 |

| | |
|--|----|
| F. Teknik Pengumpulan Data | 31 |
| G. Pengolahan Data dan Analisis Data | 31 |
| BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 33 |
| A. Keadaan Umum Kotamadya Daerah Ting- | |
| kat II Semarang | 33 |
| B. Pertambangan Pasir Di Kodya Sema- | |
| rang | 34 |
| C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ke- | |
| taatan Perizinan | 38 |
| D. Penegakan Hukum Perda Propinsi Da- | |
| ti I Jawa Tengah No. 7 Tahun 1985 . | 49 |
| E. Hambatan-Hambatan Dalam Penegakan | |
| Perda Propinsi Dati I Jawa Tengah | |
| No. 7 Tahun 1985 | 53 |
| F. Upaya-Upaya Tim Pertambangan Bahan | |
| Galian Golongan C Kodya Semarang.. | 53 |
| BAB VI. PENUTUP | 56 |
| A. Kesimpulan | 56 |
| B. Saran | 57 |
| DAFTAR PUSTAKA | 58 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

Halaman

| | |
|---|----|
| TABEL 1 : Sungai-Sungai Yang Masih Ditambang Pasirnya Di Kodya Semarang | 34 |
| TEBEL 2 : Nama Pemilik Usaha Pertambangan Pasir Dan Lokasi Penambangannya | 35 |
| TABEL 3 : Pengetahuan Pemilik Usaha Pertambangan Pasir Mengenai Peraturan Daerah No. 7 Tahun 1985 | 38 |
| TABEL 4 : Pengetahuan Responden Mengenai Dasar Dasar Hukum Izin Pertambangan Daerah . | 39 |
| TABEL 5 : Penegatahuan Respdnen Mengenai Dasar Mentaati Syarat-Syarat Dalam SIPD | 40 |
| TABEL 6 : Dasar Pertimbangan Memiliki Izin Pertambangan Daerah | 41 |
| Tabel 7 : Sebab-Sebab Mentaati Syarat-Syarat Dalam SIPD | 42 |
| TABEL 8 : Pendapat Responden Tentang Pengaruh Pendapatan Terhadap Ketaatan Perizinan | 44 |
| TABEL 9 : Pendapat Responden Tentang Pengaruh Status Sosial Terhadap Ketaatan Per izinan | 45 |
| TABEL 10: Keberadaan Petugas | 46 |
| TABEL 11: Pentingnya Memiliki Izin Pertambangan Daerah | 47 |
| TABEL 12: Pengaruh Penegakan Hukum Preda Terhadap Ketaatan Memiliki Izin Pertambangan Daerah | 48 |
| TABEL 13: Susunan Keanggotaan Tim Pertambangan Bahan Galian Golongan C Kodya Dati II Semarang | 50 |

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber kekayaan alam yang bermacam-macam jenisnya. Salah satunya adalah bahan tambang. Seperti diketahui bahwa pengelolaan sumber daya alam bisa terdiri dari berbagai bentuk sektor perusahaan. Salah satu sektor perusahaan sumber daya alam tersebut adalah sektor pertambangan, khususnya pertambangan terhadap bahan galian golongan C.

Sebagai landasan konstitusional dan sekaligus arah bagi pengaturan yang berkaitan dengan sumber daya alam tertuang dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, berisi antara lain : " Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat ".

Ketentuan pasal 33 tersebut di atas mengharapkan bahwa pelaksanaan penguasaan oleh negara atas kekayaan alam, termasuk sumber daya alam, yang salah satunya adalah pertambangan, diarahkan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh ketentuan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 menyebutkan :

" Pelaksanaan Penguasaan Negara dan pengaturan Usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I tempat terdapatnya bahan galian itu."

Atas dasar ketentuan pasal tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah Tingkat I diberi kewenangan untuk

menguasai dan membuat aturan mengenai usaha pertambangan bahan galian golongan C di daerahnya masing-masing, di mana bahan galian tersebut berada.

Dalam rangka memberikan dasar bagi usaha-usaha penggalian kekayaan bahan galian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967, dibuat aturan untuk mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan undang-undang tersebut, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967.

Dalam pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1969, menyebutkan :

" Kuasa pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I untuk melaksanakan usaha pertambangan termaksud pada ayat (1) pasal ini, disebut Surat Izin Pertambangan Daerah."

Berdasarkan pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969, bahwa kuasa pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I disebut sebagai Surat Izin Pertambangan Daerah.

Dalam pasal 1 huruf (d) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No.7 Tahun 1985 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C menyebutkan :

"Usaha pertambangan bahan galian golongan C adalah usaha pertambangan yang terdiri dari atas usaha eksploitasi, eksplorasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan galian golongan C".

Setiap usaha pertambangan bahan galian golongan C untuk harus memiliki Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD), sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 7 Tahun 1985, yang berbunyi :

"Usaha pertambangan bahan galian golongan C hanya dapat dilakukan dengan SIPD".

Gubernur dapat menunjuk Walikotamadya untuk memberikan izin pertambangan daerah. Hal ini diatur dalam pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 7 Tahun 1985, berisi :

"Dengan memperhatikan kepentingan pembangunan Daerah, Gubernur Kepala Daerah dapat menunjuk Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah memberikan SIPD untuk dan atas nama Gubernur Kepala Daerah".

Untuk usaha pertambangan bahan galian golongan C non industri dengan luas wilayah penambangan di bawah 1 hektar, sebagai akibat dikeluarkannya Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) oleh Walikotamadya. Walikotamadya diberi tugas untuk melakukan pengawasan operasional terhadap usaha pertambangan bahan galian golongan C yang termasuk kewenangannya. Hal ini berdasarkan pada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 545/99/1990. Untuk melaksanakan hal tersebut Walikotamadya Daerah Tingkat II Semarang mengeluarkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang Nomor 545.05/674 Tahun 1993 tentang Pembentukan Tim Pertambangan Bahan Galian Golongan C Di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Kegiatan usaha pertambangan pasir yang lokasinya di sungai-sungai yang relatif jauh, para pemilik usaha pertambangan pasir yang bertanggung jawab terhadap segala kegiatan penambangan pasir mulai dari perizinan sampai pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam surat izin pertambangan daerah (SIPD). Pemilik usaha pertambangan pasir harus memiliki izin pertambangan daerah, yang masa berlakunya 1 tahun, dan harus memiliki izin lagi bila masa berlakunya habis. Pasir yang merupakan kekayaan alam perlu diarahkan dalam penambangannya supaya tidak lekas habis dan terpenuhinya syarat-syarat penambangan. Melalui pengawasan dari tim pertambangan bahan galian golongan C Kodya Dati II Semarang supaya aturan yang terdapat di dalam Peraturan

Daerah No. 7 Tahun 1985 ditaati oleh pemilik usaha pertambangan pasir. Yang salah satunya adalah ketaatan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam SIPD (pasal 10 huruf g Perda Propinsi Dati I Jawa Tengah No. 7 tahun 1985).

Dikeluarkannya SIPD tersebut akan menimbulkan suatu kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang SIPD, baik ketentuan teknis penambangan maupun kewajiban lainnya yang tercantum dalam SIPD.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis kemukakan permasalahan sebagai berikut :

Apakah penegakan Hukum Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jateng No. 7 Tahun 1985 mempengaruhi ketaatan perizinan pemilik usaha pertambangan pasir di Kodya Semarang ?.